

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengambil topik ini dikarenakan masih menjadi topik yang hangat dibicarakan mengingat pemberian bantuan dana asing ini baru dilaksanakan tahun lalu, yakni pada tahun 2016.

Menariknya, meskipun Indonesia belum bisa lepas dari jerat utang, namun Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan Indonesia merupakan negara penerima bantuan IDB terbesar bila dibandingkan dengan anggota yang lain. Negara-negara yang menandatangani nota kesepahaman tersebut antara lain Indonesia, Bangladesh, Chad, Mesir, Gambia, Pakistan, Kamerun, Gabon, Burkina, dan Nigeria. Selain itu, Suriname, Maroko, Iran, Gambia, dan Kirgistan. (Setyowati, Desy, 2017)

Bantuan IDB terbesar itu dilaksanakan bersamaan pada sidang tahunan ke-41 IDB di Jakarta. IDB memberikan pinjaman senilai US\$ 1,6 miliar atau setara Rp. 21,1 miliar kepada 14 negara anggotanya. Namun, separuh dari pinjaman tersebut yaitu sebanyak US\$ 824 juta atau setara Rp. 11,5 triliun diterima oleh Indonesia. Bantuan tersebut dalam bentuk kemitraan antar-anggota IDB yang tergabung di *Member Country Partnership* (MCPS) 2016-2020. (dikutip dari <http://katadata.co.id/berita/2016/05/19/idb-beri-utang-14-negara-rp-21-triliun-separuhnya-ke-indonesia>, diakses pada 22 Maret 2017)

1.2 Latar Belakang Masalah

Sudah sejak lama upaya-upaya pembangunan perkotaan dan pedesaan di negara-negara berkembang telah dilakukan, ternyata hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Permasalahan pembangunan masih banyak yang belum dapat terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita. Permasalahan tersebut antara lain; masih adanya kesenjangan pembangunan antar daerah (disparitas), *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan.

“Pembangunan” sendiri merupakan konsep yang sangat sering dibiaskan atau diselewengkan oleh suatu golongan. Indikator yang digunakan mengukur tingkat akumulasi modal, perdagangan luar negeri dan aliran keuangan elit semuanya terkait dengan hasil (dan keuntungan atau laba) grup golongan penguasa yang terbatas dan sangat tersendiri. (Petras & Veltemeyer, 2001)

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang menampilkan perubahan yang menyeluruh dan meliputi usaha penyesuaian suatu sistem sosial kepada kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut, berpindah dari suatu kondisi yang tidak menyenangkan kepada suatu kondisi yang dianggap lebih baik secara material maupun spiritual. (Todaro & Abdullah, 1989)

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara terbelakang tidak dapat dipecahkan dengan teori-teori ekonomi barat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu bidang ilmu yang khusus berfokuskan pada pembangunan negara-negara sedang berkembang (NSB). Untuk mengerti dan memecahkan permasalahan pembangunan tidaklah cukup hanya dengan melihat dari satu sisi, melainkan aspek-aspek lain harus turut diperhatikan, seperti ilmu politik, sosial, sejarah, hukum, antropologi sosial-budaya, psikologi, sosial, demografi, administrasi negara dan sebagainya. Meskipun demikian yang mengembangkan bidang ilmu pembangunan dan yang banyak memikirkan masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang adalah justru sarjana dari Barat. (Tarmidi, 1992)

Berhasilnya pembangunan ekonomi dan sosial bukan hanya memerlukan formulasi strategi yang memadai di negara-negara berkembang, namun juga memerlukan modifikasi sistem ekonomi internasional untuk membuatnya lebih responsive terhadap keperluan-keperluan pembangunan negara-negara miskin dan berkembang. (Todaro & Abdullah, 1989)

Menurut Tarmidi, pentingnya pembangunan untuk negara-negara berkembang adalah untuk mencapai taraf hidup yang layak bagi seluruh penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan dibawah martabat manusia mayoritas negara sedang berkembang, mengusahakan pembagian pendapatan yang lebih merata, dan mengejar ketinggalan terhadap negara-negara yang telah maju.

Relevansi pertumbuhan ekonomi negara-negara barat dengan negara-negara berkembang (negara dunia ke-3), sangat terbatas karena perbedaan kondisi awal pembangunan di negara tersebut. Negara-negara maju membuktikan pengalamannya bahwa perubahan kelembagaan, teknologi, dan sosial harus dilakukan secara berbarengan, dalam usaha merealisasi pembangunan. Transformasi tersebut harus diimplementasikan bukan hanya pada negara-negara berkembang saja tetapi harus meliputi seluruh pembangunan internasional. (Todaro & Abdullah,1989)

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sistem ekonomi suatu negara.

Dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara maka diperlukan adanya program-program pembangunan yang berkesinambungan dengan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan adalah cukup tersedianya dana investasi. Kebutuhan dana investasi tersebut secara ideal seharusnya dapat dibiayai dari dana (tabungan) dalam negeri. Tetapi dalam kenyataannya seperti negara

berkembang lainnya, Indonesia masih menghadapi masalah keterbatasan modal dalam negeri yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Hal tersebut tercermin dengan adanya kesenjangan antara tabungan dalam negeri dengan dana investasi yang diperlukan. Untuk menutup investasi yang diperlukan ini, pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia.

Sejumlah pemikiran untuk perbaikan ekonomi Negara pun sudah digulirkan, sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga keuangan internasional dan sejumlah negara lain. Hal ini dikarenakan Indonesia memerlukan 'dana baru' dalam bentuk investasi. Investasi dilakukan karena secara perhitungan ekonomi, Indonesia tidak mempunyai 'saving' atau tabungan untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.

Indonesia belum bisa lepas dari jerat utang. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2016 tercatat sebesar USD314,3 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN berjangka panjang tumbuh melambat, sementara ULN berjangka pendek masih mengalami penurunan. Berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor publik tumbuh melambat, sedangkan ULN sektor swasta masih mengalami penurunan. Meskipun

begitu, Bank Indonesia memandang perkembangan ULN Mei 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadaikan risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. (Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-USD314-3-Miliar-Pertumbuhan-Utang-Jangka-Panjang-Melambat-Utang-Jangka-Pendek-Turun.aspx>, diakses pada 24 Januari 2017)

Perkembangan lembaga keuangan dan perbankan Islam di dunia semakin bisa dirasakan saat ini, meskipun perkembangannya tidak terlalu signifikan, namun setidaknya memberi dampak positif di kalangan masyarakat. Seperti halnya, IDB yang merupakan bank pembangunan Islam yang memiliki banyak badan-badan yang pada dasarnya berfokus pada pembangunan manusia, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, kerjasama perdagangan antar negara anggota, pembangunan sektor swasta, serta kajian dan pengembangan di bidang ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.

Utang luar negeri merupakan suatu masalah serius pemerintah. Jika suatu negara memiliki utang luar negeri masalah yang muncul adalah

menyangkut beban utang yaitu pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri.

Islamic Development Bank (IDB) dengan pemerintah Indonesia telah menjalankan proyek-proyek dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan perkotaan dan energi guna meningkatkan pembangunan negara. Proyek tersebut bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Bantuan IDB terbesar itu dilaksanakan bersamaan pada sidang tahunan ke-41 IDB di Jakarta. IDB memberikan pinjaman senilai US\$ 1,6 miliar atau setara Rp. 21,1 miliar kepada 14 negara anggotanya. Namun, separuh dari pinjaman tersebut yaitu sebanyak US\$ 824 juta atau setara Rp. 11,5 triliun diterima oleh Indonesia. Bantuan tersebut dalam bentuk kemitraan antar-anggota IDB yang tergabung di *Member Country Partnership* (MCPS) 2016-2020. (dikutip dari <http://katadata.co.id/berita/2016/05/19/idb-beri-utang-14-negara-rp-21-triliun-separuhnya-ke-indonesia>, diakses pada 22 Maret 2017)

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

**“ Mengapa IDB memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia
pada saat sidang tahunan ke-41 ?”**

1.4 Landasan Teoritis

Untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa IDB memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia pada saat sidang tahunan ke-41, maka penulis akan menggunakan teori konstruktivisme, konsep pembangunan dan konsep *decision making process*.

Teori Konstruktivisme

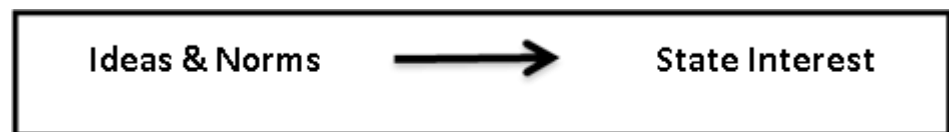
Konstruktivis merupakan sebuah teori yang berasal dari Amerika Serikat yang berkembang setelah Perang Dingin. Teori ini berkembang sebagai reaksi terhadap kegagalan teori-teori sebelumnya yang tidak bisa menjawab kondisi permasalahan tatanan dunia. Konstruktivisme pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional merupakan hasil dari konstruksi sosial yang berasal dari dialektika antara struktur dan agen, dimana lingkungan sosial politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial politik.

Struktur sebagai pembentuk perilaku aktor sosial dan politik, baik subyeknya adalah individu maupun negara, dan dengan aspek yang bukan hanya material, namun juga ideasional. Struktur normatif dan ideasional yang membentuk identitas sosial aktor-aktor politik.



Dalam bagan diatas, agent yang dimaksud adalah negara, dengan struktur yang berupa norma atau institusi, sehingga perilaku negara dipengaruhi oleh norma dan institusi. Struktur dan agen saling berpengaruh satu sama lain. Aktor-aktor politik (agent) yang melaksanakan peran penting dalam mewujudkan kepentingan yang didasarkan oleh identitas.

Konstruktivis meyakini bahwa struktur-struktur ditentukan oleh “shared ideas” (gagasan-gagasan yang diyakini bersama), daripada kekuatan material. Keyakinan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor tertentu dibentuk oleh shared ideas.



Kepentingan sebagai dasar tindakan atau perilaku politik merupakan produk dari identitas aktor-aktor. Teori konstruktivis menekankan pada sumber-sumber munculnya kepentingan dengan melihat bagaimana aktor-aktor politik mengembangkan kepentingan-kepentingannya.

Negara-negara yang bergabung dalam Islamic Development Bank tentu memiliki kepentingan masing-masing. Tidak terkecuali negara Arab Saudi yang memiliki separuh dari jumlah total hak suara. Hal ini memungkinkan Arab Saudi untuk lebih dapat mengontrol dan menentukan hasil keputusan yang sesuai dengan kepentingannya.

Dengan kata lain, konstruktivisme dibangun dengan basis ide, sehingga teori ini digolongkan ke dalam teori idealis. Konstruktivisme

menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan bentuk identitas aktor. Kemudian identitas tersebut menentukan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan tingkah laku yang dapat berupa kebijakan. Identitas pun dapat mempengaruhi bentuk dari lingkungan sosial.

Berawal dari cita-cita membangun martabat negara-negara muslim, terbentuklah Islamic Development Bank. IDB yakni bank internasional yang berbasis syariah dalam pembiayaannya yang tentunya juga diturunkan kepada tingkah laku negara-negara hingga kemudian membentuk collective meaning yang berupa kegiatan-kegiatan religius diantara negara-negara anggota.

Dalam pandangan sistem internasional, tindakan negara dalam pandangan konstruktivisme memberikan pengaruh terhadap bentuk sistem internasional, dan juga sebaliknya, sistem tersebut juga memberikan pengaruh pada perilaku negara-negara. Dari proses saling mempengaruhi tersebut, terbentuklah yang disebut “collective meanings”. “Collective meanings” yang menjadi dasar terbentuknya intersubyektifitas dan kemudian membentuk struktur dan pada akhirnya mengatur tindakan negara-negara.



Struktur yang berupa agenda internasional, disebarluaskan kepada agent-agent yang berpengaruh. Struktur tersebut mempengaruhi agent dalam tingkah lakunya dan kepentingannya. Pandangan konstruktivisme memberikan pengaruh untuk memacu negara-negara Internasional dalam berlomba-lomba membangun negaranya. Dari proses saling mempengaruhi tersebut, terbentuklah “collective menings” yang berupa tolak ukur pembangunan yang dipakai dalam kancah global.

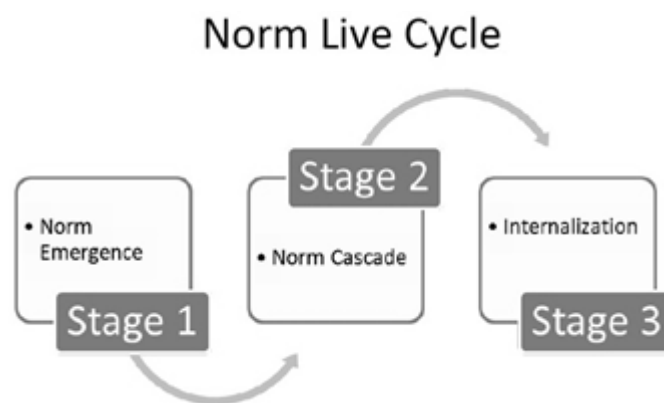
Persepsi global mengenai kewajiban dalam melaksanakan pembangunan, membuat suatu kontruksi sosial. Dari konstruksi sosial, tercemin identitas aktor, apakah negara tersebut negara maju atau negara berkembang. Setelah mendapatkan identitas, maka akan menemukan kepentingan. Negara berkembang biasanya memiliki kepentingan untuk membangun negaranya, dan usaha dalam membangun negara tersebut tertuang dalam aksi / perilaku aktor, begitu pula sebaliknya lembaga internasional memiliki dorongan untuk membantu negara-negara berdasarkan identitas tertentu.

IDB yang memiliki keanggotaan mayoritas negara-negara islam sunni, tentunya lebih dominan untuk membantu sesama negara anggota yang berkeyakinan sama. Tidak hanya identitas, namun juga terdapat aspek-aspek lainnya yang dapat dilihat sebagai peluang untuk mewujudkan kepentingannya tersebut.

Konstruksi global meyakinkan bahwa pembangunan wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Sedangkan *Human Develpoment Index*

(HDI), menyatakan bahwa Negara Indonesia tergolong dalam negara berkembang. Identitas mengenai negara berkembang inilah yang membuat, Indonesia memiliki keinginan untuk memajukan pembangunan negaranya dan negara-negara lain turut serta dalam membantu negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih menggiatkan pembangunan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan mencari bantuan dana pembangunan yang berupa pinjaman.

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa sebuah norma akan muncul-menyebar dan terinternalisasi melalui tahapan-tahapan yang membentuk suatu siklus. Siklus kehidupan suatu norma (The Norm "Life Cycle") dimulai dengan norm entrepreneurs menjadi imitation kemudian "norm cascades" selanjutnya "norm bandwagons" dan yang terakhir membentuk internalization sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Menurut strategi advokasi dari Keck dan Sikkink, Strategi leverage politics ialah strategi untuk mengungkit/mengkaitkan issue yang diperjuangkan tersebut dengan masalah *prestise* negara, kelancaran

perdagangan atau kelancaran bantuan asing atau hutang luar negeri. Untuk itu Indonesia akan menggunakan pengaruh pinjaman dari bank-bank asing.

Konsep Pembangunan

Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Para ahli pun juga memberikan definisi yang bermacam-macam mengenai arti pembangunan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, dan daerah satu dengan daerah lainnya, ataupun negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum, ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005) Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli : (Zulkarimen Nasution, 2007)

Menurut Rogers, pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Sedangkan menurut Inayatullah, Pengertian Pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi

yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Shoemaker mengungkapkan Pengertian Pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Pendapat Kleinjans mengenai definisi dari Pengertian Pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005) dalam suatu lingkungan masyarakat yang berubah menuju ke arah yang lebih baik.

Konsep Decision Making Process

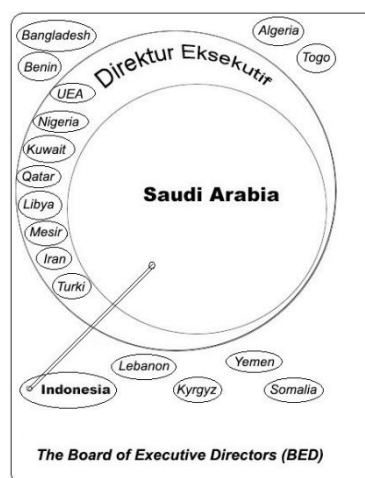
Pengambilan keputusan tentang pengaplikasian bantuan pinjaman dari IDB berada di *Board of Governor*. Meski demikian, pengambilan keputusan di *Board of Governor* sarat dengan muatan politik. Untuk

menggambarkan proses pengambilan keputusan di *Board of Governor* tersebut, penulis akan meminjam model pembuatan keputusan politik birokratik yang dikemukakan oleh Graham T. Allison.

Menurut Graham T. Allison pada Model Politik Birokratik, pengambilan keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi, bargaining game antar bangsa, sehingga pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial.

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stake holders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks.

Gambar 1.1. Aktor-aktor politik IDB dalam pengambil keputusan



Negara-negara yang menjadi adikuasa merupakan Sembilan negara yang tergabung dalam Direktur Eksekutif yang merupakan pemegang saham terbesar yakni United Arab Emirates, Qatar, Libya, Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Turki, Kuwait, dan Mesir. Terutama Negara Arab Saudi yang memiliki setengah dari hak suara. Tentu saja segala hasil dari keputusan berdasarkan pertimbangan dari kesembilan negara tersebut.

Keterlibatan Negara Arab Saudi yang memiliki setengah dari total hak suara dalam IDB tentunya memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dalam setiap keputusan yang diambilnya. Hal ini dapat saja terkait mengenai politik keagamaan. Arab Saudi yang cenderung memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara Sunni, termasuk kepada Negara Indonesia yang notabene Negara mayoritas Islam sunni.

Dengan bermodal Indonesia menjadi negara yang strategis menurut pemimpin IDB, Arab Saudi bahwasannya Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim sunni bahkan terbesar di dunia ditambah dengan Negara Indonesia merupakan negara moderat yang telah memiliki *bargaining positions* dalam IDB, yakni Indonesia selalu aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, dukungan finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, membuat Indonesia memiliki kepentingan agar IDB dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan Indonesia.

Selain itu fakta bahwa Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah modal nomer 12 terbesar dalam IDB, mendapat sorotan tajam dari IDB bahwa pinjaman yang akan digunakan di Indonesia tidak salah sasaran, dikarenakan Indonesia menjadi pasar yang tepat bagi proyek IDB.

Perpolitikan Indonesia dalam IDB juga terlihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pendiri IDB. Hal ini membuat Indonesia tergabung dalam *Board Executive Director (BED)*, dan turut membangun *Country Gateway Office (CGO)* di Indonesia.

Hal ini diperkuat sesuai dengan teori konstruktivis yang menyatakan bahwa organisasi internasional akan mempengaruhi perilaku aktor, pada saat menjadi tuan rumah sidang IDB ke 41, Indonesia berkesempatan memilih tema apa yang akan diangkat. Dikarenakan pemerintahan Indonesia pada saat ini sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur, maka tema yang diangkat dalam sidang adalah mengenai “pembangunan infrastruktur”.

Dengan bermodal Indonesia merupakan negara berasas demokrasi, maka negara yang dikendalikan pemerintah bebas mengembangkan pembangunan yang sekiranya hal tersebut menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Tentunya dengan kondisi demokrasi, IDB berharap proyek yang diberikan kepada Indonesia dapat selesai dengan tepat waktu agar

Indonesia sebagai peminjam dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut secepatnya.

1.5 Hipotesa

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mencoba untuk mengajukan hipotesa alasan IDB memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia pada saat sidang tahunan ke-41, dikarenakan keputusan tersebut dibuat Dewan Eksekutif dan dipengaruhi oleh Arab Saudi yang berkepentingan untuk mendukung Islam sunni dan moderat melalui Indonesia.

1.6 Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis hanya akan membahas alasan IDB memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia pada saat sidang tahunan ke-41.

1.7 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa alasan IDB memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia pada saat sidang tahunan ke-41. Metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis memahami dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari studi pustaka menjadi sebuah kesimpulan.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder untuk mendukung analisis penelitian. Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh penulis secara langsung yang berkaitan dengan subjek penelitian, berupa wawancara. Sedangkan data sekunder berupa jurna / dokumen dari narasumber terkait maupun dari hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan bahasan dan materi yang diteliti.

BAB I :berisi Pendahuluan yang membahas tentang alasan pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa , Batasan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :memaparkan mengenai perihal pembangunan di Indonesia, yang diukur menurut standar pengukuran I-HDI (Islamic Human Development Index).

BAB III :memaparkan mengenai komitmen IDB dalam memberikan bantuan dana asing untuk pembangunan di kancah global.

BAB IV :memaparkan analisa alasan IDB memberikan pinjaman terbesar kepada Indonesia pada saat sidang tahunan ke-41.

BAB V :merupakan kesimpulan, inti dari semua bab.